

Studi Kualitas Elemen Perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung

Azizah Nur Aulia, Verry Damayanti*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/08/2022

Revised : 15/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 147 - 156

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung merupakan wajah dari Kabupaten Bandung yang seharusnya memiliki perancangan yang baik. Pada kawasan ini masih terdapat beberapa elemen perancangan yang secara kualitas dapat dikatakan kurang baik dimana masih terdapat beberapa elemen perancangan dalam kondisi yang rusak atau bahkan tidak tersedia sehingga secara keseluruhan elemen rancang kota belum terintegrasi satu sama lain dan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi pengguna kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan agar kualitas elemen perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat teridentifikasi. Untuk mencapai tujuan ini, ke 8 aspek dalam Teori Hamid Shirvani akan diidentifikasi, sehingga dapat diketahui kondisi eksisting dan perumusan rekomendasi dan arahan kedepannya. Metode yang digunakan merupakan penelitian *mix methode*, dimana beberapa *variable* digunakan dengan pendekatan langsung melihat kondisi di lapangan dan studi literatur serta terdapat beberapa *variable* yang perlu dilakukan perhitungan. Dari analisis tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan masih terdapat beberapa elemen perancangan memiliki kualitas yang kurang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan kedepannya.

Kata Kunci : Kualitas; Elemen Perancangan; Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung

ABSTRACT

Bandung Regency Government Area is the face of Bandung Regency which should have a good design. in this area there are still some design elements that are of poor quality where there are still some design elements in a damaged condition or even not available as a whole the urban design elements have not been integrated with each other and have not been able to meet the needs and comfort for the users of the area. Therefore, the research was conducted with the aim that the quality of the design elements of the Bandung Regency Government Area can be accepted. To achieve this goal, the 8 aspects of Hamid Shirvani's Theory will be identified, so that the existing conditions and recommendations and future directions can be identified. The method used is a mixed research method, where several variables are used with a direct approach to see conditions in the field and literature studies and there are several variables that need to be calculated. From this analysis, it is known that overall there are still some design elements that have poor quality so that improvements need to be made in the future.

Keywords : Quality; Element of Urban Design; Bandung Regency Government Area

© 2022 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

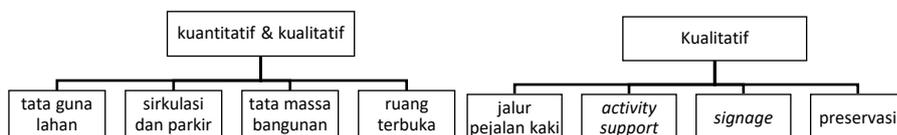
Dalam pembangunan perkotaan, terdapat salah satu peran yang sangat penting untuk memecahkan persoalan perkotaan yaitu dengan perancangan kota [1]. Setiap kawasan perlu memiliki karakteristiknya tersendiri [2], oleh karena itu dalam setiap perancangan suatu kota atau kawasan harus memperhatikan elemen perancangan seperti salah satunya pada Kawasan Pemkab Bandung yang merupakan kawasan pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan kegiatan masyarakat Kabupaten Bandung, dimana kawasan ini mengakomodasi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga kawasan ini menjadi wajah dari Kabupaten Bandung itu sendiri dan tentunya perlu adanya perancangan kawasan yang baik dan berkualitas. Terlepas dari hal tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi pembangunan pada visi dan misi yang ada, perancangan yang ada pada kawasan ini sudah sesuai. Namun, secara eksisting pada kawasan ini masih terdapat beberapa elemen perancangan yang kualitasnya kurang baik dimana masih terdapat beberapa elemen perancangan dalam konsisi yang rusak atau bahkan tidak tersedia sehingga secara keseluruhan elemen rancang kota belum terinterintegrasi satu sama lain dan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi pengguna kawasan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, mengarah pada fungsi urban design yaitu untuk peningkatan fisik ruang dan untuk memberikan karakteristik yang baik pada kawasan ini, maka perlu adanya penerapan elemen perancangan yang berkualitas guna untuk memenuhi kenyamanan baik dalam kegiatan pelayanan maupun kegiatan aktivitas sehari-hari bagi penggunaannya [3], yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kualitas Elemen Perancangan Pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka persoalan yang diangkat dalam studi ini adalah adanya permasalahan kualitas elemen perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung, sedangkan kawasan ini sendiri merupakan wajah dari Kabupaten Bandung yang seharusnya memiliki kualitas perancangan yang baik. Dimana elemen rancang kota pada kawasan ini belum terintegrasi satu sama lain. Dengan masalah tersebut maka perlu adanya identifikasi kualitas elemen rancang kota pada Kawasan Pemerintahan Kab. Bandung dan selanjutnya menimbulkan pertanyaan “Bagaimana kualitas elemen perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kab. Bandung berdasarkan elemen perancangan menurut Hamid Shirvani?”. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kualitas elemen perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung berdasarkan elemen rancang kota menurut Hamid Shirvani.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mix methods*, yaitu metode penelitian yang menggabungkan dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif [4]. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka[5]. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif (gambar 1) yang selanjutnya di komparasikan dengan teori yang digunakan dan dilakukan skoring berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan.



Gambar 1. Teknik analisis

C. Hasil dan Pembahasan

Guna Lahan

Terdapat perbedaan guna lahan antara eksisting dengan peruntukan pada RT/RW Kabupaten Bandung (2016) yaitu pada peruntukan perdagangan dan jasa namun digunakan sebagai rumah dinas sebesar 5,07 Ha.

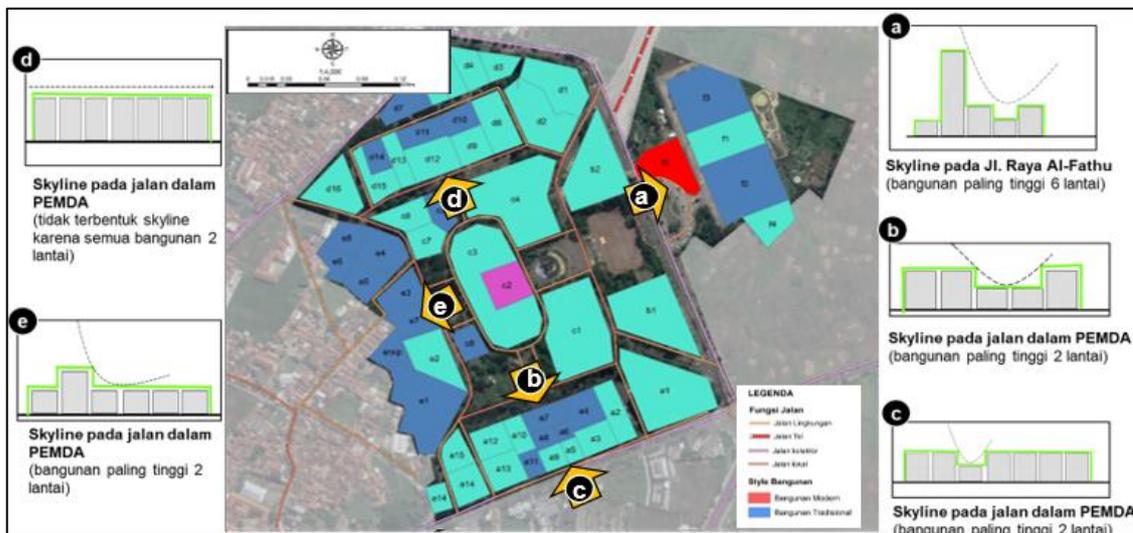


Gambar 2. Analisis guna lahan

Tata massa bangunan

a. Ketinggian Bangunan

Bangunan pemerintahan pada kawasan ini rata-rata sesuai dengan standar 2 lantai kecuali 1 bangunan yang melebihi 2 lantai, serta Rumah negara (bupati) pada kawasan ini sudah sesuai dengan standar 1-2 lantai dan ketinggian bangunan pada kawasan ini sudah dapat membentuk *skyline*.



Gambar 3. Analisis ketinggian bangunan

b. Jarak Bangunan

Rata-rata jarak bangunan pemerintahan sudah sesuai dengan standar dalam PERMEN PUPR Nomor 22/PRT/M/2018. Namun masih terdapat beberapa yang jarak bangunannya masih kurang dari standar dan untuk jarak rumah negara sudah sesuai dengan standar yaitu 3 meter.



Gambar 4. Analisis jarak bangunan

c. Intensitas Bangunan

Intensitas bangunan pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung tidak dapat dibandingkan dengan peraturan yang ada karena di Kab. Bandung belum terdapat peraturan intensitas bangunan. Namun secara eksisting, intensitas bangunan cukup beragam sehingga jika kita lihat rata-rata KDB pada kawasan ini adalah sekitar 30-40%, KLB sebesar 0,5-1 dan KDH sebesar 40-60%. Adapun GSB pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung secara keseluruhan sudah sesuai dengan jarak minimal GSB namun masih terdapat yang belum sesuai atau masih melebihi jarak minimal GSB yaitu pada bangunan yang berada di segmen 1 atau pada jalan kolektor.



Gambar 5. Analisis GSB

d. Style Bangunan

Kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung tidak terlalu menunjukkan kontras dari bentuknya. namun, kontras pada bangunan dapat terlihat dari beberapa bangunan modern di tengah bangunan tradisional pada kawasan pemerintahan atau secara umum dapat dikatakan sudah harmonis.



Gambar 6. Analisis style bangunan

Analisis Sirkulasi dan Ruang Parkir

Jaringan jalan pada kawasan pemerintahan kabupaten bandung ini juga dapat menghubungkan kawasan PEMDA sendiri dengan kawasan lain yang ada di sekitarnya, serta jaringan jalan pada kawasan Pemerintahan kabupaten bandung sudah dapat mengakomodasi beragam bentuk pergerakan, dimana jaringan jalan (kolektor) dapat dilewati oleh beragam transportasi darat meliputi sepeda hingga moda angkutan besar dengan hambatan yang rendah (tidak terjadi kemacetan) kecuali pada hari minggu.

Sedangkan untuk parkir, pada *weekday* ruang parkir pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah dapat mencukupi kebutuhan, namun pada saat *weekend* kawasan ini sering kali dipadati oleh pengunjung sehingga kerap adanya parkir liar. Ruang parkir yang ada juga tidak mengganggu aktivitas lainnya karena berupa lahan berada pada lahan suatu gedung dan terarah langsung terhadap jalan sehingga tidak menghalangi jalur keluar masuk kendaraan, dan ruang parkir berada pada tempat seharusnya dengan kondisi yang baik sehingga tidak mengganggu kawasan secara visual.



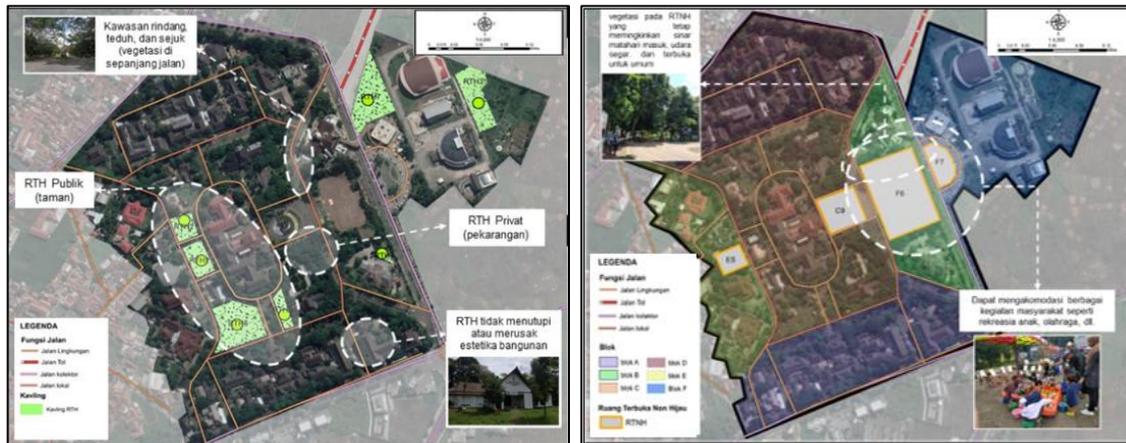
Gambar 7. Analisis sirkulasi dan parkir

Ruang Terbuka

RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebesar 9.33 Ha atau 27,02% dari yang seharusnya 30% dari total wilayah. Sekitar 27,02% tersebut terdiri dari (5,49%) RTH publik dan 21,53% RTH privat, RTH dilengkapi dengan pohon-pohon cukup rindang sehingga bisa memberikan kenyamanan yaitu kesejukan, keteduhan, dapat meredam kebisingan, & sebagai produsen oksigen, RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi Sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana pendidikan, RTH juga sudah cukup memenuhi fungsi estetika dimana RTH

yang ada tidak menghalangi bangunan serta merusak visualisasi dan bangunan dan lingkungan sekitar. Namun fasilitas pendukung pada RTH rata-rata pada kondisi tidak baik atau sudah rusak[8].

RTNH dapat memenuhi atau mewadahi berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan, kegiatan rekreasi anak-anak, dan pada hari-hari tertentu digunakan sebagai tempat perayaan hari-hari besar. Terdapat berbagai macam vegetasi pada RTNH namun tetap memungkinkan sinar matahari masuk dan udara tetap segar untuk beraktivitas. RTNH pada kawasan ini juga terbuka untuk umum sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.



Gambar 8. Analisis ruang terbuka

Jalur pejalan kaki

Lebar jalur pejalan kaki sudah sesuai dengan standar pada PERMEN PU No.3, 2014 dimana lebar jalur pejalan kaki bagian luar kiri 2,64 m dan kanan 3,36 m. serta lebar jalur pejalan kaki bagian dalam sebesar 1,68 m. Jalur pejalan kaki juga cukup aman dari lalu lintas kendaraan karena memiliki ketinggian yang lebih dari jaringan jalan dan Jarak pandang dari trotoar cukup luas dalam melihat lingkungan yang lain dan tidak terhalang serta Street furniture yang ada memiliki gaya desain yang seragam. Namun, terdapat jalur khusus bagi disabilitas namun dalam kondisi yang kurang baik.

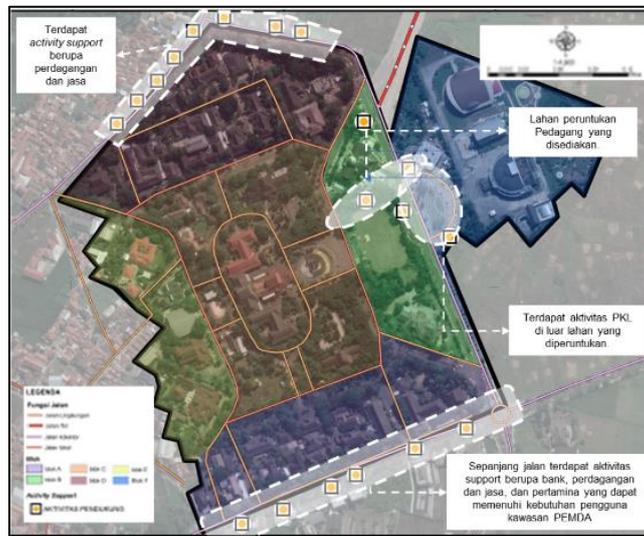


Gambar 9. Analisis jalur pejalan kaki

Activity Support

Terdapat berbagai aktivitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna Kawasan PEMDA berupa perdagangan dan jasa, pertamina, fotocopy, tempat makan, warung, PKL, dll. Aktivitas pendukung pada sekitar kawasan dapat mendukung kegiatan utama pemerintahan yaitu dengan mempermudah pengunjung dalam memenuhi kebutuhannya seperti untuk makan, mengisi bahan daya, fotokopi, dan lain-lain. Pedagang

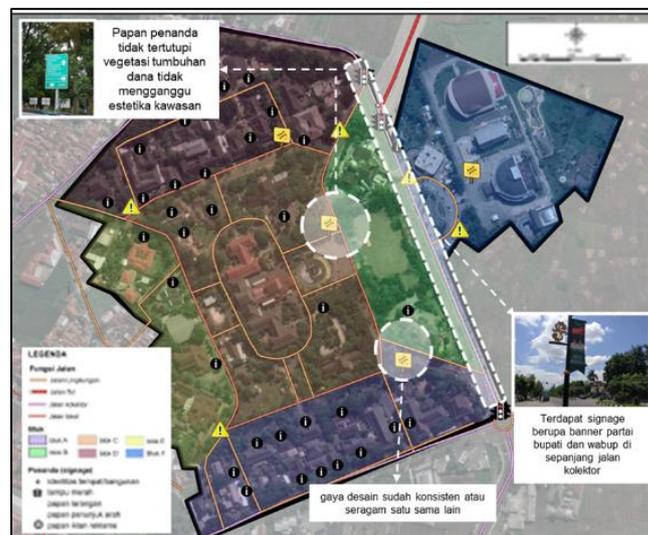
kaki lima pada kawasan ini sudah di beri lahan khusus yaitu berdekatan dengan Masjid Al-Fathu, namun karena lahan yang ada cukup kecil sehingga masih banyak PKL yang berdagang tidak pada tempat yang diperuntukan.



Gambar 10 Analisis aktivitas pendukung

Signage

Elemen penanda pada sudah dapat dengan mudah di mengerti sehingga dapat memberikan petunjuk arah lokasi bagi pengguna kawasan, *Signage* sudah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak terhalang oleh bangunan atau vegetasi sehingga dapat dengan mudah dilihat dari kejauhan. *Signage* pada kawasan ini sudah memiliki gaya desain yang konsisten atau seragam satu sama lain sehingga dapat membentuk ciri khas kawasan, dan *signage* tidak menghalangi bangunan yang ada dan tidak mengganggu visual kawasan.



Gambar 11 Analisis signage

Preservasi

Lokasi tidak diatur dalam tata ruang namun penerapah atap tradisional dilakukan untuk menjaga dan mencerminkan kabupaten bandung dengan kekhasan sunda. *Design* preservasi sudah mempertimbangkan salah satu komponen estetika detail arsitektur sunda dimana ditandai dengan pemasangan atap tradisional, sehingga jika ada pembangunan kedepannya perlu mengadopsi gaya atap tradisional yang serupa. Diperlukan juga upaya perlindungan bangunan berupa dengan pemasangan atap tradisional pada pembangunan bangunan kedepannya sehingga membentuk estetika yang seragam dan indah dilihat.



Gambar 12 Analisis Preservasi

Selanjutnya setelah dilakukan analisis, hasil analisis tersebut dilakukan skoring berdasarkan perbandingan hasil analisis dengan parameter yang ada, selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 1** berikut:

Tabel 1 Skoring dan penilaian hasil analisis

NO	Variabel	Sub Variabel	Rata-rata skor	Ket
1	Guna lahan	Penggunaan lahan	1	Tidak Baik
		Intensitas bangunan (KDB,KLB,KDH,GSB)	2	Sedang
2	Tata Bangunan	Ketinggian bangunan	2.7	Sedang
		Jarak antar bangunan	2.5	Sedang
		Style bangunan	2	Sedang
3	Sirkulasi Dan Ruang Parkir	Sirkulasi jalan	3	Baik
		Ruang parkir	2.7	Sedang
4	Ruang Terbuka	Ruang terbuka hijau	2.75	Sedang
		Ruang terbuka non hijau	2.7	Sedang
5	Jalur Pejalan Kaki	Jalur Pejalan Kaki	2.8	Sedang
6	Activity Support	Activity Support	2.7	Sedang
7	Signage	Signage	3	Baik
8	Preservasi	Preservasi	2.7	Sedang

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Kualitas guna lahan pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kondisi yang tidak baik, dimana terdapat perbedaan guna lahan antara eksisting dengan peruntukan pada RTRW yaitu pada peruntukan perdagangan dan jasa namun digunakan sebagai rumah dinas.

Ketinggian bangunan pada kawasan ini dalam kualitas yang sedang, dimana dari 3 kriteria yang ada terdapat 2 kriteria dalam kondisi yang baik dimana rumah negara (bupati) pada kawasan ini sudah sesuai dengan standar (1-2 lantai), ketinggian bangunan yang rata-rata merupakan 2 lantai maka *skyline* pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten cukup beragam dan satu dalam kondisi sedang yaitu bangunan pemerintahan pada kawasan ini rata-rata sesuai dengan standar 2 lantai kecuali 1 bangunan yang melebihi 2 lantai.

Jarak rumah dinas maupun gedung negara pada kawasan ini dalam kualitas sedang, dimana dari 2 kriteria yang ada terdapat 1 kriteria yang baik yaitu Jarak rumah negara sudah sesuai dengan standar yaitu 3 meter dan satu kriteria dalam kondisi kualitas sedang yaitu rata-rata jarak bangunan pemerintahan sudah sesuai dengan standar namun masih terdapat beberapa yang jarak bangunannya masih kurang dari standar.

Style bangunan pada kawasan ini memiliki kualitas yang sedang karena kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung tidak terlalu menunjukkan kontras dari bentuknya. Namun, kontras pada bangunan dapat terlihat dari beberapa bangunan modern di tengah bangunan tradisional pada kawasan pemerintahan atau secara umum dapat dikatakan sudah harmonis.

Jaringan jalan pada kawasan ini memiliki kualitas yang baik dimana kedua kriteria yang ada dalam kondisi yang baik dimana Jaringan jalan pada kawasan pemerintahan kabupaten Bandung ini juga dapat menghubungkan kawasan PEMDA sendiri dengan kawasan lain yang ada di sekitarnya dan Jaringan jalan pada kawasan Pemerintahan kabupaten Bandung sudah dapat mengakomodasi beragam bentuk pergerakan, dimana jaringan jalan (kolektor) dapat dilewati oleh beragam transportasi darat meliputi sepeda hingga moda angkutan besar dengan hambatan yang rendah (tidak terjadi kemacetan) kecuali pada hari minggu.

Ruang parkir pada kawasan ini memiliki kualitas yang sedang, dimana dari ketiga kriteria yang ada terdapat 2 kriteria dalam kondisi baik, dimana ruang parkir tidak mengganggu aktivitas lainnya karena berupa lahan berada pada suatu lahan dan terarah langsung terhadap jalan sehingga tidak menghalangi jalur keluar masuk kendaraan dan ruang parkir berada pada tempat seharusnya dengan kondisi yang baik sehingga tidak mengganggu kawasan secara visual dan 1 kriteria dalam kondisi sedang dimana pada saat *weekday* ruang parkir pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah dapat mencukupi kebutuhan, namun pada saat *weekend* kawasan ini sering kali dipadati oleh pengunjung sehingga kerap adanya parkir liar pada kawasan.

Ruang terbuka hijau pada kawasan ini memiliki kualitas sedang, dimana dari ketiga kriteria yang ada terdapat 1 kriteria yang tidak sesuai atau dalam kondisi sedang yaitu RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebesar 9,33 Ha atau 27,02% dari yang seharusnya 30% dari total wilayah. 27,02% tersebut terdiri dari (5,49%) RTH public dan 21,53% merupakan rth private dan terdapat 3 kriteria memiliki kualitas yang baik dimana dilengkapi dengan pohon-pohon cukup rindang sehingga bisa memberikan kenyamanan yaitu kesejukan, keteduhan, dapat meredam kebisingan, & sebagai produsen oksigen), RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana pendidikan bagi pelajar khususnya anak TK & SD), dan RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi Sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana pendidikan bagi pelajar khususnya anak TK & SD).

RTNH pada kawasan ini memiliki kualitas sedang, dimana dari ketiga kriteria yang ada terdapat 1 kriteria dalam kondisi sedang dimana terdapat berbagai macam vegetasi pada RTNH namun tetap memungkinkan sinar matahari masuk dan udara tetap segar untuk beraktivitas dan sisanya dalam kondisi yang baik, dimana RTNH dapat memenuhi atau mewadahi berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan olahraga dan terbuka untuk umum sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Kualitas jalur pejalan kaki pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung sudah baik, dimana dari ke 5 kriteria yang ada terdapat 1 kriteria dalam kondisi yang rusak (jalur bagi disabilitas) dan 4 kriteria lainnya dalam kondisi yang baik dimana Lebar jalur pejalan kaki (bagian luar) kiri 2,64 m dan kanan 3,36 m. serta lebar jalur pejalan kaki bagian dalam sebesar 1,68 m (sudah sesuai), Jalur pejalan kaki cukup aman dari lalu lintas kendaraan karena memiliki ketinggian yang lebih dari jaringan jalan, Jarak pandang dari trotoar cukup luas dalam melihat lingkungan yang lain dan tidak terhalang, dan Street furniture yang ada memiliki gaya desain yang seragam.

Kualitas aktivitas pendukung pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 3 kriteria yang ada, terdapat 2 kriteria dalam kondisi yang baik, dimana terdapat berbagai aktivitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna Kawasan PEMDA, Aktivitas pendukung di sekitar kawasan dapat mendukung kegiatan utama pemerintahan. Namun, terdapat 1 kriteria memiliki kualitas yang sedang dimana Pedagang kaki lima pada kawasan ini sudah di beri lahan khusus yaitu berdekatan dengan Masjid Al-Fathu, namun karena lahan yang ada cukup kecil sehingga masih banyak PKL yang berdagang tidak pada tempat yang diperuntukan.

Kualitas *signage* pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 4 kriteria yang ada, seluruhnya dalam kondisi yang baik, dimana Elemen penanda pada sudah dapat dengan mudah di mengerti, *Signage* sudah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak terhalang, *Signage* sudah memiliki gaya desain yang konsisten atau seragam, dan *Signage* tidak menghalangi bangunan yang ada dan tidak mengganggu visual kawasan.

Kualitas preservasi pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 3 kriteria yang ada hanya terdapat 1 kriteria dalam kondisi sedang dan sisanya baik [10], dimana Lokasi tidak diatur dalam tata ruang namun penerapan atap tradisional dilakukan untuk menjaga dan mencerminkan kabupaten bandung dengan kekhasan sunda. Dan terdapat 2 kriteria dalam kondisi yang baik dimana Design sudah mempertimbangkan salah satu komponen estetika detail arsitektur sunda dimana ditandai dengan pemasangan atap tradisional dan Upaya perlindungan bangunan berupa dengan pemasangan atap tradisional pada pembangunan bangunan kedepannya.

Daftar Pustaka

- [1] D. susi ;Pramadha R. Prihatin, Ed., *Aplikasi Teori Perencanaan : dari konsep ke realita*. Yogyakarta: CV. Buana Grafika, 2020.
- [2] D. Aritonang, "Kajian pengaruh elemen perancangan kota terhadap pembentukan citra kawasan mesjid raya dan istana maimoon tesis," universitas Medan, 2014.
- [3] D. Rahmiati, "Kajian Elemen Pembentuk Ruang Kota pada Ruang Terbuka Publik Kota (Studi Kasus : Alun-alun Karanganyar)," *Ikraith Teknol.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2017.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, 2018.
- [5] Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Citapustaka Media, 2012.
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036*. 2016.
- [7] MENTERI PEKERJAAN UMUM, *PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA*. 2018.
- [8] Bidang Tata Ruang Kabupaten Bandung, "Tata Ruang Kabupaten Bandung." <https://tataruang.bandungkab.go.id/>
- [9] Menteri Pekerjaan Umum, *PERMEN PU No.3 tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN*. 2014.
- [10] H. P. Sinaga, *MANAJEMEN PRESERVASI JALAN UNTUK PENGELOLAAN JARINGAN JALAN WILAYAH*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2021.